

## **BAB IV**

### **FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN UNI EROPA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERMASALAHAN SEPARATISME DI SPANYOL (CATALUNYA)**

Rekam jejak Uni Eropa dalam menjadi mediator atau pihak ketiga dalam sebuah konflik tidak perlu di ragukan lagi, bahkan mediasi masuk dalam agenda tersendiri bagi Uni Eropa sebagai alat kebijakan, namun dalam permasalahan yang terjadi antara Pemerintah Spanyol dan Catalunya Uni Eropa menolak ketika diminta sebagai mediator atau pihak ketiga dalam konflik tersebut. Sebelumnya kita harus memahami konteks mediasi dalam permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Mediasi meskipun sebuah cara yang digunakan oleh pihak ketiga dalam menengahi sebuah masalah namun dalam konteksnya mediator harus menempatkan diri pada kasus dimana aktor menjadi mediator. Dalam permasalahan Catalunya dengan pemerintahan Spanyol, posisi Spanyol sebagai negara anggota Uni Eropa sehingga sikap yang diambil Uni Eropa jika memediasi konflik tersebut secara tidak langsung mengakui kemerdekaan Catalunya dari Spanyol hal tersebut dapat memperumit hubungan Uni Eropa dengan negara anggotanya meskipun terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan penolakan tersebut. Dalam bab IV ini penulis akan memaparkan temuan dari hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Uni Eropa menolak menjadi mediator dalam permasalahan separatism Di Spanyol (Catalunya).

#### **4.1 Uni Eropa Hanya Mendukung Integrasi dan Stabilitas dalam Kawasan**

Integrasi merupakan salah satu penyebab terbentuknya Uni Eropa, negara-negara bergabung dengan menyatukan tujuan dan kepentingan bersama demi menciptakan kawasan yang stabil baik dari segi ekonomi, politik dan keamanan. Salah satu agenda sejak dibentuknya Uni Eropa adalah memperluas Integrasi kawasan dengan membuka peluang bagi negara-negara di kawasan Eropa yang belum tergabung dengan Uni Eropa untuk bergabung dengan Uni Eropa. Syarat yang wajib dilalui negara-negara tersebut untuk bergabung dengan Uni Eropa tidak mudah dan harus melewati proses yang panjang. Oleh karena itu negara-negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa berusaha memenuhi persyaratan tersebut sehingga masuk dalam kandidat negara anggota Uni Eropa.

Salah satu penyebab penolakan Uni Eropa memediasi Catalunya adalah Uni Eropa hanya mendukung integrasi yang dapat membuat sebuah negara tetap stabil dari segi politik ekonomi dan keamanan. Mr Charles-Michel Geurts Wakil Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam menjelaskan bahwa jika Uni Eropa menjadi mediator dalam permasalahan yang terjadi antara Pemerintah Spanyol dan Catalunya maka secara tidak langsung Uni Eropa turut mendukung pemisahan diri tersebut yang mana hal ini bertolak belakang dengan integrasi yang telah dikampanyekan dan menjadi agenda Uni Eropa sejak lama. Kebijakan yang di ambil Uni Eropa dengan menolak permintaan Catalunya untuk memediasi konflik tersebut juga menjaga hubungan dengan Spanyol sebagai negara anggota Uni Eropa yang mana jika itu terjadi maka akan menciptakan

krisis politik dalam kawasan Uni Eropa mengingat Spanyol merupakan salah satu negara besar Uni Eropa.<sup>1</sup>

Dalam sistem Uni Eropa regional yang terletak di bawah pemerintahan negara Anggota merupakan bagian yang terintegrasi dengan Uni Eropa dimana kawasan tersebut juga akan mendapatkan hak yang terdapat dalam Uni Eropa. Catalunya ketika memisahkan diri dengan Spanyol maka akan kehilangan seluruh hak yang di peroleh dalam kawasan Uni Eropa. Hal tersebut menandakan dengan pemisahan diri tersebut maka Catalunya bukan lagi merupakan bagian dari integrasi Uni Eropa hal tersebut akan mempersulit Catalunya karena mayoritas negara-negara di Eropa bahkan di luar Eropa tidak akan mengakui jika Catalunya mendeklarasikan kemerdekaannya karena hubungan mereka dengan Spanyol. Bersamaan dengan hal tersebut jika Catalunya mendeklarasikan kemerdekaannya maka jalan untuk kembali menjadi anggota Uni Eropa lagi harus di tempuh mulai dari Awal lagi seperti negara-negara lain yang ingin bergabung dengan melewati proses yang telah ditentukan.

Untuk terintegrasi kembali dengan Uni Eropa Catalunya yang telah memisahkan diri dari Spanyol harus melewati serangkaian proses sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan oleh Uni Eropa dalam pertemuan Copenhagen pada tahun 1993. kriteria tersebut pertama sebagai kandidat negara anggota Uni Eropa harus dalam kestabilan yang memuaskan dari segi ekonomi dan politik meliputi kestabilan institusi yang dapat menjamin demokrasi, rasa hormat, hak asasi manusia dan supremasi hukum serta mampu memberikan proteksi

---

<sup>1</sup> Mr. Charles-Michel Geurts, Wakil kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Diskusi dan wawancara terkait Penolakan Uni Eropa Sebagai Mediator dalam permasalahan Separatisme di Spanyol (Catalunya), Kantor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam di Jakarta, Rabu, 15 November 2017 pukul 11.00-12.00

terhadap kaum minoritas. Pada tahap selanjutnya kandidat di harapkan memiliki ekonomi pasar yang bagus dan tidak mati sehingga kandidat mampu mengatasi tekanan dan persaingan akan kekuatan pasar dalam Uni Eropa serta wajib tunduk pada persatuan politik, ekonomi dan moneter yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>Berdasarkan kriteria tersebut Uni Eropa tidak hanya ingin memperluas integrasi tapi juga memastikan kestabilan dalam kawasan regional tetap terjaga.

Peluang untuk terintegrasi dengan Uni Eropa memang terbuka bagi Catalunya jika merdeka dari Spanyol, namun hal tersebut hampir tidak mungkin terealisasi dengan hubungan yang demikian, baik dengan Spanyol maupun negara anggota Uni Eropa lainnya. Memang benar bahwa Uni Eropa menginginkan Perluasan Integrasi dalam wilayah Eropa, akan tetapi hal tersebut tidak akan terjadi jika negara-negara anggota Uni Eropa tidak mengakui kemerdekaan Catalunya. Uni Eropa sebagai organisasi Internasional tidak memiliki kapasitas untuk mengakui kedaulatan negara hanya negara yang dapat mengakui kedaulatan negara lainnya. Jika menempuh jalan kemerdekaan dari Spanyol otomatis hubungan Catalunya dengan Spanyol tidak lagi harmonis atau dapat dikatakan buruk sehingga jalan ketika Catalunya menginginkan integrasi dengan Uni Eropa bisa dipastikan buntu karena negara-negara lain merupakan sekutu dari Spanyol, negara-negara tersebut juga merupakan sekutu dari Catalunya jika Catalunya tetap terintegrasi kedalam wilayah Spanyol.

Sebagai Contoh permasalahan serupa dalam konflik Kosovo dan Serbia yang merupakan negara di wilayah Balkan, dalam konflik

---

<sup>2</sup> Presidency Conclusions :Copenhagen European Council 21-22 June 1993 dalam [http://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf) diakses pada Jum'at, 1Desember 2017 pukul 10.11 wib

tersebut Uni Eropa bergerak menjadi mediator untuk mencegah dan mengakhiri konflik tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa Kosovo menginginkan kemerdekaan dari Serbia karena masalah etnis dan kekerasan yang terjadi disana. Serbia tidak dalam posisi untuk bernegosiasi melainkan mencari solusi bersama sehingga menemui jalan tengah. Serbia merupakan kandidat kuat anggota baru Uni Eropa namun karena permasalahan kekerasan dan konflik yang terjadi hal tersebut dapat membahayakan psosisi Serbia untuk bergabung sebagai anggota Uni Eropa terancam gagal karena tidak dapat menciptakan stabilitas dan demokrasi. Bagi Kosovo ketika memutuskan untuk memisahkan diri dan merdeka, seluruh negara anggota Uni Eropa mengakui kemerdekaan Kosovo kecuali lima negara yang terdiri dari Spanyol, Yunani, Siprus, Slovakia dan Rumania.<sup>3</sup>

Kosovo sejak kemerdekaannya pada tahun 2008 telah mengagendakan kebijakan luar negerinya untuk berintegrasi ke dalam Uni Eropa. Meskipun Lima negara tersebut yang tidak mau mengakui kedaulatan Kosovo namun untuk terintegrasi, Uni Eropa tidak dapat mencegah proses tersebut karena menurut article 49 dalam perjanjian Uni Eropa Kosovo jika memenuhi persyaratan Kosovo dapat mengajukan permohonan untuk berintegrasi ke dalam Uni Eropa. Proses tersebut bakal mengalami hambatan dikarenakan lima negara tersebut menggunakan hak vetonya menolak Kosovo kedalam integrasi Uni Eropa. Permasalahan Kosovo dan Catalunya berbeda dari segi wilayah meskipun sama-sama berada di daratan Eropa .Kosovo yang berada di wilayah Balkan sedangkan Catalunya merupakan bagian dari Uni Eropa. Menurut Mr. Charles hal ini berpengaruh terhadap negara

---

<sup>3</sup> Zephyr Dessus and friends, 2017, Discussion paper “Kosovo’s EU candidate status : a goal within reach”, European policy Centre, Belgium

anggota Uni Eropa dalam menentukan kebijakan mengakui kedaulatan antara Kosovo dan Catalunya.

Dalam sisi lainnya pemisahan diri Catalunya dari Spanyol akan merusak integrasi dan stabilitas serta konflik jangka panjang, karena Catalunya meskipun berpotensi dan memenuhi criteria yang ditetapkan untuk terintegrasi dengan Uni Eropa hal tersebut tetap akan menimbulkan konflik dengan Spanyol dan negara anggota lainnya karena Catalunya pernah menjadi bagian dari Uni Eropa dibawah pemerintahan Spanyol. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab di tolaknya permintaan mediasi Catalunya dalam konflik dengan pemerintah Spanyol. Karena Uni Eropa menganggap sulit untuk berintegrasi kembali di masa yang akan datang dan akan timbul gangguan kestabilan kawasan untuk jangka waktu yang panjang dengan pemisahan diri tersebut.

#### **4.2 Pemisahan Diri Catalunya dari Spanyol Dapat Menimbulkan Efek Domino.**

Sejak dibentuknya, Uni Eropa merupakan kawasan yang mengedepankan perdamaian, integrasi dan stabilitas dalam kawasan, menurut Mr. Charles dalam kurun waktu tersebut negara anggota Uni Eropa tidak pernah terlibat konflik satu sama lain. Hal tersebut menandakan keberhasilan Uni Eropa membangun integrasi kawasan yang damai dan bebas dari konflik seperti yang terjadi sebelumnya, kejadian tersebut juga membuat Uni Eropa sebagai contoh bagi kawasan regional lainnya. Namun meski demikian stabilitas kawasan Uni Eropa bukan benar-benar tidak menghadapi permasalahan. Permasalahan separatisme merupakan permasalahan yang sering muncul dalam Uni Eropa. Di kawasan Inggris ada

Skotlandia, di Belgia ada Flanders dan di Spanyol tidak hanya Catalunya melainkan juga ada Basque Country yang ingin memisahkan diri dari Spanyol. Kondisi seperti ini yang sebenarnya mengguncang perpolitikan negara dan kawasan.

Ketika ada permintaan dari Catalunya kepada Uni Eropa untuk memediasi konflik yang terjadi dengan pemerintahan Spanyol, Uni Eropa dengan tegas menolak permintaan tersebut selain dengan alasan menimbulkan kekacauan integrasi jangka panjang dan gangguan dalam stabilitas kawasan, faktor lain penyebab di tolaknya permintaan tersebut adalah kekhawatiran Uni Eropa akan terjadi efek domino. Efek domino ini dikhawatirkan membangkitkan semangat kaum separatis lainnya yang telah mengupayakan kemerdekaan dari negara mereka terutama di kawasan Uni Eropa. Dengan mendukung mediasi atas permintaan Catalunya berarti Uni Eropa mendukung separatisasi yang nantinya dapat dimanfaatkan kaum separatis lain. Dengan demikian krisis politik tidak hanya akan terjadi di Spanyol melainkan di kawasan dan seluruh wilayah Eropa lainnya.

Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan bahwa Uni Eropa akan menolak dengan tegas segala Upaya yang dilakukan oleh Catalunya untuk memisahkan diri termasuk menjadi mediator dan akan mendukung pemerintahan di Madrid. Penolakan tersebut dilakukan karena menurut Juncker Uni Eropa ingin menghindari pemisahan diri sebab sudah cukup banyak pemisahan diri dan perpecahan jadi Uni Eropa tidak menginginkan hal-hal seperti itu terjadi lagi, karena kalau tidak Uni Eropa akan kehilangan kendali. Integrasi nasional dan Integrasi Eropa harus selalu bergandengan

tangan. Selain itu Uni Eropa tidak menghendaki nantinya memiliki anggota yang terdiri lebih dari 95 negara<sup>4</sup>

Berdasarkan apa yang di ungkap oleh Juncker bahwa pemisahan diri membahayakan Catalunya dan tidak menghendaki jika nanti Uni Eropa beranggotakan lebih dari 95 negara, padahal salah satu agenda Uni Eropa adalah memperluas integrasi kawasan. Ungkapan tersebut dengan artian jika nantinya Uni Eropa memediasi Catalunya yang mana nantinya akan membangkitkan separatis lainnya maka nanti akan muncul negara-negara kecil baru. Negara-negara ini secara tidak langsung dapat membubarkan integrasi kawasan Uni Eropa yang pada akhirnya kejadian Uni Soviet terulang kembali pada Uni Eropa, dimana muncul negara-negara baru karena proses disintegrasi yang terjadi pada Soviet yang mana hal tersebut merupakan akhir dari kebesaran Uni Soviet.

Negara-negara dalam Uni Eropa juga mengkhawatirkan hal yang sama dengan pemisahan diri Catalunya dari Spanyol hal itu akan berimbas kepada separatis di negaranya maka dari itu tidak ada yang mendukung kemerdekaan tersebut, mereka hanya mendukung Madrid untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera. Seperti pada permasalahan Kosovo, Spanyol merupakan salah satu negara yang menolak mengakui kedaulatan Kosovo. Hal ini dikarenakan Spanyol tidak ingin pengakuan terhadap Kosovo membuat gerakan Separatis di Spanyol lebih hidup seperti yang terjadi di Catalunya dan Basque Country. Meskipun pada akhirnya gerakan tersebut muncul ke permukaan.

---

<sup>4</sup> Jamie Detmer, Uni Eropa tegaskan tolak Separatisme di negara anggotanya, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/uni-eropa-tolak-separatisme-negara-negara-anggota-4094931.html> diakses pada jum'at, 1 Desember 2017 pukul 22.45 wib

Berbagai tanggapan pro dan kontra mengenai krisis di Spanyol, Vladimir Putin menganggap krisis politik yang terjadi di Spanyol dan sikap dari negara-negara Eropa tersebut adalah penampakan dari kemunafikan karena negara-negara dalam Uni Eropa mendukung gerakan Separatisme negara tertentu akan tetapi menolak separatisme lainnya. Contoh yang dimaksud oleh Putin adalah dalam permasalahan Serbia dan Kosovo dimana mayoritas negara Uni Eropa mendukung kemerdekaan Kosovo namun hal tersebut tidak berlaku bagi Catalunya dan Kurdistan di Irak.<sup>5</sup> Berdasarkan apa yang diungkapkan Putin yang secara tidak langsung beranggapan bahwa efek domino tersebut diciptakan oleh negara-negara Uni Eropa itu sendiri yang seharusnya bersikap sama terhadap permasalahan separatisme.

Efek domino yang dikhawatirkan oleh petinggi Uni Eropa dan negara-negara anggota terhadap pemisahan diri Catalunya dari Spanyol ternyata juga dikhawatirkan oleh negara-negara diluar kawasan tersebut yang memiliki potensi kasus serupa. Di Indonesia misalnya yang memiliki potensi gerakan separatisme di Aceh dan Papua khawatir kemerdekaan Catalunya akan membangkitkan kembali gerakan separatisme tersebut sehingga Indonesia dengan tegas melalui menteri luar negeri menolak kemerdekaan Catalunya.<sup>6</sup> Hal ini bisa dianggap wajar mengingat beberapa dekade silam Indonesia yang mengalami krisis serupa yang terjadi di wilayah Aceh, pada saat itu Uni Eropa bergerak sebagai mediator dalam konflik tersebut yang memastikan Aceh tetap dalam kedaulatan Indonesia.

---

<sup>5</sup> BBC, Uni Eropa Lepas tangan soal krisis Catalunya dalam <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41690159> diakses pada jum'at, 1 Desember 2017 pukul 23.45 wib

<sup>6</sup> Niken Purnamasari, Menlu: Indonesia tidak akan mengakui kemerdekaan Catalunya dalam <https://news.detik.com/berita/d-3703771/menlu-indonesia-tidak-akan-mengakui-kemerdekaan-catalonia> diakses pada jum'at, 1 Desember 2017 pukul 23.47 wib

Sikap Indonesia selain mengkhawatirkan efek domino adalah turut mendukung Uni Eropa menolak sebagai mediator atas permintaan Catalunya secara sepihak. Pemisahan diri Catalunya salah satunya merupakan faktor etnis yang mana Catalunya menganggap bahwa mereka adalah bangsa Catalan bukan bangsa Spanyol, jika kita melihat pada motto Uni Eropa “United in Diversity” moto tersebut hampir sama dengan semboyan Indonesia “Bhineka tunggal ika”, karena di Indonesia sendiri terdiri dari ratusan suku yang berbeda tapi mengedepankan integrasi. Berdasarkan semboyan tersebut perbedaan dapat dipandang bukan menjadi sebuah permasalahan dalam mencapai persatuan justru perbedaan dapat menjadi alat integritas bangsa.

#### **4.3 Fungsi Uni Eropa sebagai Organisasi Regional Terbatas.**

Catalunya ingin memisahkan diri dari Pemerintah Spanyol dan melakukan referendum untuk mendeklarasikan kemerdekaan, namun pihak Pemerintah Spanyol menganggap apa yang dilakukan oleh Catalunya sebagai daerah otonomi Spanyol telah melanggar hukum dan konstitusi Spanyol sehingga pemerintah Spanyol menyatakan sikap sepihak tersebut illegal dan menyalahi konstitusi Spanyol sehingga pemerintah Spanyol tidak akan melakukan mediasi dalam bentuk apapun terhadap Catalunya dan menganggap wilayah Catalunya tetap menjadi bagian dari pemerintahan Spanyol. Catalunya tetap kokoh menginginkan kemerdekaannya namun karena Spanyol menolak mediasi dalam bentuk apapun karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi yang ada di pemerintahan Spanyol maka Catalunya meminta secara langsung kepada Uni Eropa untuk menjadi mediator dalam permasalahan tersebut.

Uni Eropa menolak permintaan Catalunya tersebut selain dua faktor yang disebutkan sebelumnya, faktor lain yang menyebabkan Uni Eropa menolak permintaan tersebut adalah Uni Eropa sebagai organisasi regional tidak dapat menembus konstitusi Spanyol. Menurut Mr. Charles Uni Eropa dapat berhubungan secara langsung dengan Catalunya yang merupakan bagian dari wilayah Spanyol, meskipun Catalunya dapat berhubungan langsung dengan Uni Eropa akan tetapi konstitusi yang berlaku dengan hubungan tersebut adalah Konstitusi Spanyol sehingga Catalunya merupakan anggota Uni Eropa di bawah konstitusi Spanyol yang mana hubungan dengan Catalunya di luar konstitusi tersebut dianggap tidak sah dan menyalahi aturan. Jika konstitusi Spanyol memberikan kebebasan independen pada Catalunya maka Catalunya berhak menentukan nasibnya dalam Uni Eropa.

Sebagai contoh Catalunya merupakan bagian dari wilayah Pemerintahan Spanyol namun ketika Catalunya diberi kebebasan menentukan nasibnya sendiri Catalunya berhak memutuskan akan tetap menjadi bagian dari Uni Eropa atau tidak meskipun Catalunya adalah wilayah Spanyol. Seperti apa yang terjadi pada konstitusi Denmark. Denmark merupakan Anggota Uni Eropa yang tergabung pada 1973, di dalam wilayah Denmark terdapat Greenland yang diberikan otonomi secara penuh oleh Denmark yang mana pada tahun 1985 Greenland memutuskan keluar dan tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa. Meskipun Greenland keluar dari Uni Eropa Greenland tetap merupakan wilayah dari Denmark yang mana Denmark merupakan anggota Uni Eropa. Jadi wilayah dalam sebuah negara yang di berikan otonomi secara penuh berhak menentukan nasibnya sendiri apakah tergabung atau tidak dalam Uni Eropa meskipun wilayah itu tetap merupakan bagian dari negara tersebut.

Konstitusi Spanyol menyatakan bahwa apa yang dilakukan Catalunya adalah Ilegal maka Uni Eropa mendukung apa yang ada pada konstitusi Spanyol dengan menganggap apa yang dilakukan oleh Catalunya sebagai sesuatu yang illegal juga sebab hubungan yang dibangun oleh Uni Eropa adalah hubungan langsung dengan negara yaitu Spanyol kecuali Spanyol dalam konstitusinya menyebutkan hal yang berbeda maka Uni Eropa bisa membangun hubungan langsung dengan Catalunya seperti contoh yang telah disebutkan diatas. Dalam konstitusi Spanyol, Catalan merupakan wilayah otonomi yang tidak dapat dipisahkan dari Spanyol. Konstitusi tersebut dijadikan pegangan oleh pemerintah Spanyol untuk tidak melepaskan Catalunya meskipun Catalunya dan Spanyol memiliki sejarah perbedaan yang panjang.

Uni Eropa menghargai konstitusi Spanyol sebagai negara anggota dengan menolak permintaan Catalunya tersebut, penolakan yang dilakukan oleh Uni Eropa juga didasari dengan landasan konstitusi Uni Eropa untuk menghormati segala aspek fundamental negara anggota mereka termasuk konstitusi. Landasan tersebut tertera pada perjanjian Lisbon artikel nomor 4 ayat 2 yang berbunyi :

“The Union shall respect the equality of Member States before the Treaties as well as their national identities, inherent in their fundamental structures, political and constitutional, inclusive of regional and local self-government. It shall respect their essential State functions, including ensuring the territorial integrity of the State, maintaining law and order and safeguarding national security. In particular, national security remains the sole responsibility of each Member State<sup>7</sup>.”

Berdasarkan apa yang tertera pada perjanjian Lisbon tersebut maka Uni Eropa harus menghargai konstitusi yang ada di Spanyol yang

---

<sup>7</sup> Lisbon treaty, dalam <http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-1-common-provisions/5-article-4.html> diakses pada senin 4 Desember 2017 pukul 01.00

menyatakan Catalunya bagian yang tidak terpisahkan dari Spanyol, jika Uni Eropa menerima permintaan Catalunya untuk menjadi mediator dalam konflik tersebut maka Uni Eropa telah melanggar perjanjian dengan negara anggotanya pada perjanjian Lisbon tersebut. Hal tersebut menandakan keterbatasan fungsi Uni Eropa sebagai Organisasi Regional bukti bukti lain yang terletak diatas adalah ketika Uni Eropa mampu menjadi mediator dalam satu permasalahan hal tersebut tidak berlaku ketika berhadapan dengan negara anggotanya.

Spanyol memiliki posisi yang berbeda, Pada kasus Serbia dan Kosovo yang mana mereka bukan merupakan anggota Uni Eropa Sehingga mereka tidak memiliki kapasitas menggerakkan kebijakan Uni Eropa sedangkan negara anggota memiliki kapasitas tersebut karena menyangkut kepentingan bersama. Dalam hal ini meskipun Catalunya merupakan bagian penting yang dapat independen mandiri bukan berarti Catalunya dapat melangkahi Spanyol dan membuat pernyataan sepihak dengan langsung menembus Uni Eropa. Uni Eropa tetap akan pada penilaian terhadap apa yang dilakukan Spanyol yang merupakan anggotanya , bukan Catalunya karena tidak dapat memaksakan kebijakan domestik suatu negara, justru Spanyol yang dapat menggerakkan kebijakan dalam Uni Eropa yang mana dapat kita lihat dengan jumlah kursi dalam parlemen Uni Eropa yang dapat mempengaruhi setiap kebijakan yang sedang di bicarakan. Sikap Spanyol ketika dengan tegas mengatakan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan internal yang sesuai dengan konstitusinya maka hal itu sudah merupakan keputusan bulat yang harus dihargai Uni Eropa demi tujuan dan kepentingan bersama semua pihak termasuk negara anggota Uni Eropa yang memiliki permasalahan yang sama.

#### **4.4 Pemisahan diri Catalunya dapat Mengguncang Perekonomian Spanyol, dan Uni Eropa**

Berbicara mengenai Uni Eropa berarti berbicara Integrasi dan kerja sama, jika berbicara mengenai integrasi dalam Uni Eropa hal tersebut tidak bisa dilihat dari satu aspek integrasi saja melainkan mencakup keseluruhan aspek dari Integrasi mulai dari Ekonomi, politik dan keamanan serta kawasan. Pada satu sisi pemisahan diri Catalunya dari Spanyol dapat mengguncang kawasan dari berbagai aspek salah satunya Ekonomi. Menurut Mr, Charles salah satu alasan penyebab ditolaknya permintaan Catalunya untuk memediasi konflik dengan Pemerintahan Spanyol adalah Uni Eropa tidak ingin perekonomian kawasan terganggu yang dapat menyebabkan efek yang serius, hal tersebut di karenakan Catalunya merupakan daerah yang cukup besar dan berpengaruh di Spanyol karena memiliki arus perekonomian yang besar dan berdampak terhadap keberlangsungan Spanyol dengan menyumbang hampir 20 persen perekonomian di Spanyol.

Meskipun dalam prosesnya mediasi masuk dalam rencana jangka panjang Uni Eropa namun tidak berlaku untuk Catalunya yang secara sepihak ingin memisahkan diri, dengan memediasi permasalahan Catalunya yang secara tidak langsung Uni Eropa mengakui kemerdekaan Catalunya maka Spanyol akan kehilangan 20 persen pemasukannya yang dapat menciptakan krisis perekonomian yang besar di wilayah Spanyol. Krisis perekonomian tersebut akan memiliki efek buruk pula terhadap perekonomian Uni Eropa Sementara Catalunya bukan lagi menjadi bagian dari Uni Eropa jika proses pemisahan diri tersebut berhasil dilakukan. Oleh karena itu Uni Eropa mendukung kepentingan Spanyol untuk mempertahankan kedaulatannya agar tidak menimbulkan efek jangka panjang.

Sektor perekonomian Catalunya yang berputar dalam pariwisata dan industry dengan kemampuan menarik Investor sangat bagus sehingga untuk menganalisa efek perekonomian Uni Eropa akibat pemisahan diri tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika terjadi krisis politik seperti ini para investor akan mengalihkan investasinya dari wilayah tersebut bahkan bisa saja keluar dari Spanyol. Jika keluar dari Spanyol dimana perekonomian tidak lagi berjalan dengan baik maka akan terjadi masalah pada kesejahteraan masyarakat Spanyol yang mungkin akan berujung pada meningkatnya kriminalitas dalam wilayah tersebut. Uni Eropa akan merasakan efek buruk dari hal tersebut tidak sendirian melainkan dengan seluruh anggotanya.

Seperti yang kita ketahui Uni Eropa dan beberapa anggotanya menerapkan system borderless atau bebas melintasi batas dalam kawasan Uni Eropa . Krisis Ekonomi yang membawa kepada ketimpangan Ekonomi akan membuat peningkatan kejahatan yang bisa saja terjadi di luar Spanyol. Perekonomian yang buruk akan mempersempit pula lapangan pekerjaan sehingga daya saing terhadap kebutuhan akan pekerjaan semakin meningkat dan menjadi efek yang benar-benar serius untuk dihadapi maka dari itu terdapat perbedaan dalam memediasi konflik diantara negara anggota dengan di luar wilayah Uni Eropa.

#### **4.5 Implikasi Teoritik**

Dalam permasalahan Separatisme di Spanyol *Intergovernmentalist Approach* dapat memberikan penjelasan tentang perilaku Uni Eropa dalam pengambilan keputusan yang memang di dasari oleh kedaulatan dan kepentingan domestik dimana aktor domestic menggerakkan Organisasi menuju suatu output untuk

mencapai tujuan bersama. Untuk memudahkan pemahaman mengenai permasalahan ini, konflik ini dianalogikan dengan demikian. Uni Eropa menjadi bus sebagai sebuah sarana yang dapat digunakan untuk menuju ke sebuah tempat yang bernama perdamaian dan kesejahteraan. Untuk mencapai pada tempat tersebut sekelompok orang dengan Tujuan yang sama memutuskan untuk berangkat secara bersama-sama dan akhirnya membeli bus yang dapat mewujudkan kepentingan orang-orang tersebut. akhirnya setelah memiliki bus, orang-orang tersebut berkumpul untuk menentukan siapa yang menjadi supir dan mengurus keperluan lainnya, karena mungkin jarak perjalanannya jauh. karena orang yang didalam bus tidak dapat memastikan arah dan seberapa jauh jaraknya maka dengan membentuk kesepakatan akhirnya diputuskan untuk menyupir dan mengurus kebutuhan lainnya secara bergantian.

Dalam perjalanannya terkadang menjadi lancar terkadang terdapat kendala seperti pengemudi yang mengemudikan bus tersebut kadang terlalu cepat sehingga membuat penumpang lainnya mabuk perjalanan atau kadang pengemudi nya terlalu lambat yang membuat penumpang gelisah karena banyak memakan waktu dan biaya perjalanan. Sikap pengemudi tersebut biasanya didasari oleh faktor identitas dan kepentingan mereka masing-masing ,seperti pengemudi yang terlalu cepat mengambil keputusan tersebut kadang tidak memperhatikan kerugian yang dialami penumpang lain. atau pengemudi yang terlalu lambat karena tidak berani mengambil resiko dan takut terjadi sesuatu di perjalanan sehingga dia menyesuaikan kemampuan dengan kepribadiannya. Bus tersebut memiliki kapasitas yang besar namun baru di isi oleh beberapa orang saja sehingga orang-orang tersebut memutuskan bagaimana jika mencari penumpang lain

dengan tujuan yang sejalan, selain untuk menghemat biaya perjalanan akan memperbesar persatuan dengan tujuan yang sama.

satu persatu penumpang mulai naik kedalam bus tersebut sehingga terkadang mereka menggunakan perjanjian sebelumnya atau memperbarui perjanjian sesuai dengan kepentingan bersama tanpa mengganggu kepentingan pribadi Seperti memasuki tempat duduk penumpang lain jika masuk dan duduk dengan izin maka hal tersebut tak menjai masalah untuk menambah kedekatan tapi jika sampai membuka tas atau barang pribadi milik penumpang yang mana itu sudah melewati batas yang telah di tentukan bersama jika seluruh penumpang dalam bus tersebut harus mematuhi kesepakatan bersama yang telah di tentukan dan yang mengemudikan bus tersbut serta divisi didalamnya juga harus memahami batasan-batasan. karena jika tidak memperhatikan aspek tersebut sebelum mencapai tujuan bersama terjadi perpecahan sehingga bagaimana caranya setiap penumpang saling membatu dan mengontrol diri masing-masing secara professional.

Rata-rata penumpang membawa anak mereka di pangkuan mereka dimana perlakuan yang diberikan kepada anak-anak mereka sama sebagai penumpang bus tersebut, tetapi tidak sama sebagai pemilik kursi. Kecuali mereka membebaskan anak mereka untuk memilih akan tetap ikut dalam perjalanan atau menentukan perjalanannya sendiri seperti menggunakan sepeda motor misalnya, jadi meskipun tidak termasuk sebagai penumpang dalam bus tersebut mereka tetap sebagai anak penumpang dalam bus tersebut. pada perjalanannya seorang anak penumpang yang berada dalam pangkuan memilih untuk pindah kedalam bus yang lain dengan tujuan yang

berbeda karena merasa tidak nyaman berada dipangkuan penumpang tersebut sedangkan peraturan yang ada dalam bis seorang penumpang boleh membawa anak tetapi tidak bisa mendapatkan dua kursi. Penumpang tersebut tidak mengizinkan anaknya untuk pisah dengan tujuan lain karena merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan meskipun anak tersebut adalah anak adopsi namun sudah di tentukan oleh hukum yang tidak dapat dilanggar kecuali izin orang tuanya, penumpang yang lain dan pengemudi tidak dapat mencampuri urusan internal keluarga tersebut, meskipun sang anak meminta bantuan kepada yang mengendalikan bus tersebut untuk meyakinkan orang tuanya agar dapat di turunkan. Pengemudi dan penumpang yang lain hanya menyarankan agar anak tersebut berbicara secara baik-baik kepada orang tuanya, namun anak tersebut tetap bersih keras untuk turun dan memisahkan diri dari orang tuanya sehingga pengemudi menolak untuk berdialog dengan anak tersebut dan permasalahan tersebut diserahkan kepada orang tuanya dengan dukungan untuk mempertahankan anak tersebut dalam pangkuannya oleh pengemudi dan penumpang lain.

Pengemudi tersebut mau berkomunikasi Jika orang tuanya yang meminta pengemudi tersebut untuk melakukan dialog. Maka hal tersebut berarti sikap pengemudi tersebut diarahkan oleh penumpang yang memiliki tujuan yang sama. Karena pengemudi bus tersebut hanya mendukung persatuan keluarga bukan perpisahan secara sepihak, jika pengemudi tersebut berdialog dengan permintaan anak tersebut dan kemudian mengajak orang tuanya berdialog juga maka pengemudi tersebut sudah melanggar kepentingan pribadi penumpang tersebut. kemudian faktor lainnya adalah dengan berdialog dan member jalan anak tersebut untuk turun penumpang tersebut membawa sebagian

keuangan orang tuanya yang bisa menyebabkan keuangan orang tuanya tersebut menjadi tidak menentu dan akhirnya mengganggu penumpang yang lain juga kemudian dapat menghambat perjalanan sehingga tujuan tersebut jadi terasa begitu sangat lama dan berpotensi berakhir sebelum sampai kepada tujuan tersebut. pengemudi dalam bus juga menghargai kepentingan penumpang lain yang memiliki kasus serupa dengan orang tua tersebut yang khawatir nantinya anak penumpang yang lain mengikuti jejak anak tadi yang ingin memisahkan diri. Pengemudi tidak ingin nantinya bus itu penuh sesak melebihi kuota kursi yang ada yang mana semakin banyak penumpang semakin banyak permasalahan kompleks yang bakal dihadapi untuk mempertahankan bus tersebut agar bisa jalan sampai ketujuannya.

*Intergovernmentalism Approach* yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini yang berawal dari Hoffman memberikan kritiknya pada neo-functionalists berpendapat yang sama bahwa jika kepentingan pribadi aktor yang menentukan dan menggerakkan bus tersebut untuk mencapai tujuan tertentu karena jika mereka berjalan kaki maka kemungkinan mereka bertemu penjahat di jalan, atau mengalami kecelakaan saat berjalan ditabrak mobil, melawan perampokan sangat besar karena tidak ada sarana untuk menuju tujuan tersebut namun jika menggunakan bus maka masalah mungkin dapat dihadapi secara bersama-sama.

NeoFunctionalism mengatakan bahwa jika negara berintegrasi maka akan menimbulkan efek bola salju yang membuat perekonomian negara tersebut semakin meningkat.<sup>8</sup> namun Neo-Functionalism tidak memperhatikan bahwa efek bola salju juga dapat mengganggu dan

---

<sup>8</sup> Michelle Cini, ibid 89

menghancurkan perekonomian negara dan kawasan integrasi jika ada anggota dalam mengalami krisis atau gangguan perekonomian yang mana pada analogi tadi menyebabkan Bus tersebut terhambat sampai ketujuan. Ditambah lagi proses pelepasan kedaulatan kedalam kawasan Integrasi sehingga menjadi borderless tidak mencerminkan kedaulatan yang diharapkan negara. Sebagai contoh Inggris yang tidak berkenan berbagi kedaulatan ketika berintegrasi dengan Uni Eropa menegaskan kritik pada neo-Functionalisme , karena kepentingan negara mengenai tidak dapat di kemudikan oleh Organisasi tetapi Negara yang mengemudikan organisasi secara bersama-sama. Begitu juga dalam kasus ini Uni Eropa tidak dapat menentukan kedaulatan Spanyol tetapi Spanyol yang menegaskan kedaulatannya dalam Uni Eropa sehingga pembuatan keputusan sesuai dengan peraturan Spanyol mengenai domestic policynya. Sebagai contoh bahwa teori ini mendukung permasalahan yang dibahas adalah ketika lima anggota Uni Eropa tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dimana dalam hal ini Uni Eropa tidak dapat menggerakkan Negara untuk memutuskan kebijakannya, namun negara yang menggerakkan Uni Eropa dengan 22 negara lainnya yang mengakui kemerdekaan Kosovo dan fungsi Uni Eropa hanya sebagai mediator yang digerakkan oleh negara-negara tersebut.

